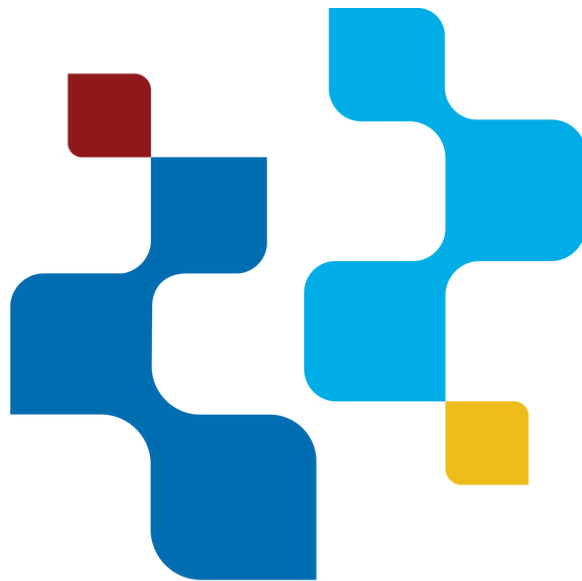




LAPORAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KAB. BANGKA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah - Nya sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023 bertujuan untuk mengetahui Target dan Capaian Sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023. Selain hal tersebut Laporan Evaluasi Rencana Strategis juga digunakan sebagai salah satu upaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023 masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunannya, sehingga saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan sebagai upaya dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sungailiat, Oktober 2024

Kepala Dinas,



Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II : CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran	II-1
2.2. Evaluasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-6
BAB III : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT	
3.1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	III-1
3.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	III-4
BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
4.1. Kesimpulan	IV-1
4.2. Rekomendasi	IV-1

DAFTAR Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023	II-2
Tabel 2.2 Skala Nilai Perangkat Kinerja	II-4
Tabel 2.3 Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023	II-7
Tabel 3.1 Program prioritas dan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada didalam koridornya.

Penyusunan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara tahunan terhadap Implementasi Rencana Strategis yang telah disusun guna melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.



86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka melaksanakan tugas yang mendukung pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tercantum pada **misi yang ke 1 (satu)** yaitu **"Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi informasi"** dan **misi yang ke 5 (lima)** yaitu **"Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan"**.

Evaluasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan salah satu dari siklus perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil.

Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka, pada tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019-2023, untuk tahun 2019 dan tahun 2020 program dan kegiatan belum mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menstandarisasi nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3078 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun untuk tahun 2021-2023 program dan kegiatan mengalami pemutakhiran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021



yaitu tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

Adapun Evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah disusun, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
12. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan Daerah
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005- 2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
39. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 38).
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Evaluasi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 adalah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan hasil evaluasi kinerja ini dapat digunakan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 ini adalah :



- a. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 mulai dari tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan serta sub kegiatan;
- b. Mengukur nilai keberhasilan pelaksanaan program . kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja untuk perencanaan yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Evaluasi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

- a. Bab I. Pendahuluan : berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
- b. Bab II. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah : berisi evaluasi capaian tujuan dan sasaran, evaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra 2019-2023;
- c. Bab III. Faktor Pendorong dan Penghambat : berisi faktor pendorong pencapaian tujuan dan ssaran, program, kegiatan serta sub kegiatan Renstra Tahun 2019-2023 serta faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan Renstra Tahun 2019-2023 baik internal maupun eksternal;
- d. Bab IV. Kesimpulan dan Rekomendasi : berisi hasil kesimpulan dan rekomendasi untuk penyusunan Renstra pada periode selanjutnya.



BAB II

CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Capaian Tujuan dan Sasaran

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka. Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah “Bangka Setara”. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Makna Bangka Setara:

Sejahtera:

- Kondisi masyarakat yang memiliki ketahanan material dan spiritual, ditandai dengan:
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- Tingkat pendapatan yang merata.
- Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran.
- Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- Pemerataan pembangunan antar wilayah.

Mulia:

- Kondisi masyarakat yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi, mampu membentuk karakter dan peradaban yang berakhlak, beretika, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan berinovasi.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, sebagai berikut :



1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas;
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah;
4. Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional;
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangka tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mendukung misi yang ke satu dan ke lima dari 5 (lima) misi Kabupaten Bangka sebagai berikut :
"Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi" dan Misi 5 :
"Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan".

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

VISI			
BANGKA SETARA			
MISI			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi			
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Dinkominfo	Meningkatnya kualitas layanan Dinkominfo	Pemenuhan kebutuhan pendukung pelayanan melalui pengadaan dan pemeliharaan	Pembangunan gedung baru.
		Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
		Peningkatan disiplin aparatur melalui pengadaan seragam.	Peningkatan kinerja ASN.
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui diklat, bintek dan workshop.	Peningkatan kapasitas SDM bidang Pranata Komputer, Sandiman dan Statistik
		Melalui penambahan SDM ASN dan Tenaga Harian Lepas	Penambahan SDM dengan Prioritas kualifikasi di bidang Pranata Komputer, Persandian dan Statistik.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinkominfo	Peningkatan efektifitas kinerja dan tertib administrasi melalui penyediaan regulasi kebijakan dan penyusunan SOP.	Peningkatan kinerja ASN dengan prioritas pada penyediaan regulasi kebijakan



Meningkatkan kualitas sistem pelayanan informasi, komunikasi, statistik dan persandian	Meningkatnya penerapan E-Government dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat	Penyebaran informasi dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan KIM dan FK-METRA.	Peningkatan peran serta masyarakat dengan prioritas pembentukan KIM ditingkat kelurahan dan pembentukan FK-METRA di tingkat kabupaten.
		Penyebarluasan informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui media elektronik.	Penyebarluasan informasi melalui optimalisasi web.
		Terlaksananya 10 layanan e-government sesuai standart layanan e-government.	Penyediaan 10 layanan e- government secara bertahap dengan skala prioritas pada layanan penyediaan internet OPD, penyediaan jaringan antar OKPD, layanan pembuatan aplikasi dan fasilitas internet ruang publik.
		Peningkatan kinerja statistik melalui penyediaan system satu data	Optimalisasi integrasi data antar OPD.
		Penyediaan alat persandian, assistensi dan penyelenggaraan assessment keamanan informasi Kabupaten Bangka.	Peningkatan nilai indeks keamanan informasi
		Peningkatan tata kelola hubungan antar OPD melalui koordinasi dan penetapan kebijakan	Optimalisasi pemahaman dan penyamaan persepsi antar OPD terkait keamanan informasi.

Untuk melihat capaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah terhadap target tahunan dan target akhir Renstra yang ditetapkan maka ditetapkan kriteria capaian kinerja berdasarkan Skala Nilai Perangkat Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% 100%	Sangat Tinggi
2	76% 90%	Tinggi
3	66% 75%	Sedang
4	51% 65%	Rendah
5	50%	Sangat Rendah



Tabel 2.3
Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target					Capain					Nilai Peringkat Capaian Kinerja					Rata-Rata Peringkat Kinerja
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Akuntabilitas Dinkominfo	Nilai AKIP	B	BB	BB (72,75)	BB (73,00)	BB (73,25)	B	BB	BB (76,15)	BB (75,58)	BB (76,98)	100	100	104,67	103,53	105,09	102,66
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	2,5	2,7	-	-	-	2,47	2,77	-	-	-	98,80	102,59	-	-	-	100,69
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	60,80	60,90	70,00	-	-	60,80	60,90	N/A	-	-	100,00	100,00	N/A	100,00
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	-	-	2,90	3,10	3,30	-	-	2,25	1,85	2,44	-	-	77,59	59,68	73,94	70,40



Tabel 2.3 menunjukan capaian kinerja dari tujuan/sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 dan 2020, Indeks SPBE Kabupaten Bangka dengan target 2,5 terealisasi sebesar 2,47 dengan klasifikasi C dan pada tahun 2020 dari target yang ditetapkan sebesar 2,7, hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 2,77 dengan klasifikasi B, namun pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan sebesar 2,9, hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 2,25 dengan klasifikasi C, tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebesar 3,1, hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 1,85 dengan klasifikasi C sedangkan tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebesar 3,3, hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 2,44 dengan klasifikasi C. Tahun 2021-2023 terjadi penurunan hasil penilaian SPBE.

2.2. Evaluasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Data capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 berdasarkan tabel E.80 Permendagri 86 Tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah DINKOMINFOTIK Kabupaten Bangka
Periode Pelaksanaan Tahun 2019-2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota yang mengacu pada Sasaran RRMJ Kabupaten Kota

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Indeks e-government	2,5	2,7			
2. Indeks keterbukaan informasi publik	60	70			
3. Peningkatan keamanan informasi publik	100	100			
4. Peningkatan data statistik yang diambel	100	100			
5. Hasil evaluasi APSP PJ			72,75	73,00	73,25
6. Peningkatan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			44,12	50	59,82

[illegible]



Evaluasi Renstra Dinkominfo Kabupaten Bangka 2019-2023

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Pelaksanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Pelaksanaan	Target Rencana Peningkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-										Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Unit Penanggung Jawab								
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023					
						(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)					
						K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K		%	K	%	K	%			
		Kegiatan Pengembangan Subang Informatika	Kegiatan Bakti Komunitas	0	900	274.917.000	250	117.078.000	250	157.893.000,00						250	116.628.250	250	103.575.200,00							100	99,61	100	65,82							DINKOMINFOK			
		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KKM di Tingkat Kecamatan (%)	0	50	67.530.000	50	67.530.000	0	0,00						50	42.875.000	0	0,00							100	63,42	0,00	0,00								DINKOMINFOK		
		Kegiatan Mekanisme dan Pembinaan Website Desa	Jumlah Desa yang memiliki Website	0	20	67.530.000	20	67.530.000	0	0,00						20	42.875.000	0	0,00							100	63,42	0,00	0,00								DINKOMINFOK		
		Program Kelembagaan Informasi dan Media Massa	Persentase Kebijakan Strategi Renda yang Diinformasikan Kepada Masyarakat (%)	0	70	3.903.936.332	50	1.728.030.500	70	1.901.465.832,00						50	1.174.132.211	70	1.901.465.832,00							100	90,04	100	100								DINKOMINFOK		
		Kegiatan Penyuluhan Informasi Penyempugan	Jumlah Peserta dengan Media Massa (sat)	0	50	3.903.936.332	25	1.667.470.500	25	1.901.465.832,00						25	1.695.927.138	25	1.901.465.832,00							100	99,31	100	100									DINKOMINFOK	
		Kegiatan Penyuluhan Informasi Pembangunan yang Berbasis Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jalur literasi (sat)	0	40	61.960.000	40	61.960.000	0	0,00						40	56.375.073	0	0,00							100	91,80	0,00	0,00										
		URUSAN PEMERINTAH DAERAH PERKOTAAN				58.750.000		212.732.000		38.750.000							145.031.340		32.691.600																				
		Program Pengembangan Perencanaan Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Jaring Komunikasi dan Koordinasi Perencanaan Daerah	0	100	58.750.000	100	212.732.000	100	38.750.000,00						100	145.031.340	100	32.691.600,00							100	98,19	100	84,37									DINKOMINFOK	
		Kegiatan Sosialisasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi VIP	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)	0	90	81.991.000	90	81.991.000	0	0,00						90	80.696.275									100	99,52	0,00	0,00										
		Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Koordinasi Jaring Komunikasi dan Koordinasi Perencanaan Daerah	Jumlah Admin Perencanaan (orang)	0	34	40.000.000	34	122.745.000	34	20.000.000,00						34	56.375.073	34	15.000.000,00							100	45,33	100	75,00										
		Kegiatan Penyuluhan Informasi Pembangunan yang Berbasis Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah SGM Bidang Perencanaan yang diarah (orang)	0	40	18.750.000	0,00		40	18.750.000,00									40	17.691.600,00						0,00	0,00	100	94,36										
		URUSAN PEMERINTAH DAERAH STATISTIK				335.877.200		320.303.000		15.574.200							312.611.850		14.562.200																				
		Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Persentase kelengkapan data secara up to date dan akurat (%)	0	100	335.877.200	100	320.303.000	100	15.574.200,00						100	312.611.850	100	14.562.200,00							100	97,90	100	93,90									DINKOMINFOK	
		Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Buku Jata Statistik Pembangunan	0	2	75.373.200	1	71.805.000	1	3.574.200,00						1	64.233.850	1	3.574.200,00							100	89,46	100	100										
		Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Buku Jata Statistik Pembangunan	0	2	90.300.000	1	90.300.000	1	0,00						1	90.180.000	0	0							100	99,87	0,00	0,00										
		Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Terselenggaranya Redaksi dan Penyusunan Laporan	0	2	170.198.000	1	190.198.000	1	12.000.000,00						1	190.198.000	1	10.988.000,00							100	100	100	91,57										
		Perubahan Renstra Periode 2021-2023																																					
		URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOMUNIKASI DAN INFORMASI				354.11.145.023				7.137.213.136		3.190.231.460		3.714.811.660			6.407.376.531		7.540.907.076						8.933.378.711														
		Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nila aspek perencanaan kinerja dalam RPJPD (Nilai)	0	25,25	17.346.893.193				25,25	4.991.402.766	23,25	5.980.113.300	23,25	5.381.914.978			23,25	3.870.242.700	23,25	3.960.980.567	20,25			4.767.117.126					100	94,40	100	73,62	100	80,55		DINKOMINFOK		
			Nila aspek pelaporan kinerja dalam RPJPD Perangkat Daerah (Nilai)	0	10,25					10,25		10,25		10,25			10,25		10,25						10,25						100		100		100				
			Persentase temuan pengelolan keuangan Perangkat Daerah dalam RPJPD (%)	0	0,00					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00					0,00						100		100		100					
			Indeks Profesionalisme Aparatur (Nilai)	0	67,76					64,86		67,76		67,76			64,86		67,76					67,76						100		100		100					
			Indeks Tata Kelola Organisasi (Nilai)	0	1,25					0,95		1,25		1,25			0,95		1,25					1,25						100		100		100					
			Persentase Pemenuhan Peraturan Pendukung Kinerja (Nilai)	0	100					100		100		100			100		100					100						100		100		100					
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Nilai)	0	100					90,00		12,75		12,75			90,00		12,75					12,75						100		100		100					
		Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja yang Sesuai Standar (%)	0	100	163.183.004				100	45.002.098	100	82.060.000	100	130.334.320			100	45.404.780	100	81.570.093	100			129.329.045					100	100	100	93,43	100	93,23				
			Persentase Pelaporan Kinerja yang Sesuai Standar (%)	0	100					100		100		100			100		100					100						100		100		100					
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan P3	Jumlah dokumen perencanaan P3 (Jumlah)	0	21	33.093.669				7	21.734.200	7	53.200.000	6	53.834.320			7	21.715.100	7	52.781.899	6			53.516.225					100	99,73	100	99,21	100	99,41				
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen P3-GKP3	Jumlah Dokumen P3-GKP3 dan Laporan 1000 Koordinasi Penyusunan Dokumen P3-GKP3 (Jumlah)	0	5	22.750.000				20	23.827.490	20	28.840.000	5	19.850.000			20	23.769.650	20	28.789.000	5			19.575.000					100	99,76	100	99,82	100	99,61				
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan P3-GKP3	Jumlah Dokumen Perubahan P3-GKP3 dan Laporan 1000 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan P3-GKP3 (Jumlah)	0	2	7.000.000								2	7.000.000			0,00	- 0,00	- 2				7.000.000					0,00	0,00	0,00	0,00	100	100					
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan P3-GKP3	Jumlah Dokumen P3-GKP3 dan Laporan 1000 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan P3-GKP3 (Jumlah)	0	2	11.150.000								2	11.150.000			0,00	- 0,00	- 2				10.737.823					0,00	0,00	0,00	0,00	100	90,30					
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan P3-GKP3	Jumlah Dokumen Perubahan P3-GKP3 dan Laporan 1000 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan P3-GKP3 (Jumlah)	0	2	11.150.000								2	11.150.000			0,00	- 0,00	- 2				11.150.000					0,00	0,00	0,00	0,00	100	100					
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan P3-GKP3	Jumlah Dokumen Perubahan P3-GKP3 dan Laporan 1000 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan P3-GKP3 (Jumlah)	0	60	51.139.135								4	7.000.000			0,00	- 0,00	- 4				7.000.000					0,00	0,00	0,00	0,00	100	100					
		Sub Kegiatan Bakti Komunitas	Jumlah Laporan Bakti Komunitas (Jumlah)	0	8	24.450.000								8	20.250.000			0,00	- 0,00	- 8				20.250.000					0,00	0,00	0,00	0,00	100	100					



Evaluasi Renstra Dinkominfo Kabupaten Bangka 2019-2023

No	Sasaran Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Pelaksanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Pelaksanaan	Target Rencana Peangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-										Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Unit Penanggung Jawab					
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)		(32)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	(22)				
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang didasarkan sesuai standar (%)	0	100	12.396.982.883				100	3.426.427.600	100	4.056.671.900	100	3.454.508.943					100	2.743.246.485	100	2.840.098.038	100	2.944.483.710				100	80,06	100	70,81	100	85,25		
			Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (%)	0	100					100		100		100						100		100		100					100		100		100			
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang berbasis (Bukan)	0	36	12.974.932.983				12	3.426.427.600	12	4.056.671.900	12	3.432.499.143					12	2.743.246.485	12	2.840.098.038	12	2.923.486.961				100	80,06	100	70,81	100	85,17		
			Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai (Bukan)	0	114					38		38		38						38		38		38					100	0,00	100	0,00	100	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tambil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Jumlah)	0	2	22.050.000								2	22.050.000					0,00	-	0,00	-	2	21.367.749				0,00	0,00	0,00	0,00	100	96,77		
		Kegiatan Administrasi Manajemen Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Menguasai Kompetensi Pengembangan Kompetensi (%)	0	100	133.350.000				10,00	-	0,00	3.000.000	52,00	56.031.180					10,00	-	100	3.000.000	52,00	56.031.180				100	0,00	0,00	100	100	100		
			Persentase Aparatur yang Berkeja Tepat Waktu (%)	0	100					100		100		100						100		100		100					100		100		100			
			Persentase Aparatur yang pendakim kinerja baik (%)	0	100					100		100		100						100		100		100					100		100		100			
		Sub Kegiatan Pengadaan Raksan Jasa Beres Akut	Jumlah paket/pelaksanaan dinas beserta Akut kelengkapan (Bukan)	0	48	33.950.000				16	-	16	3.000.000	1	9.750.000					0,00	-	16	3.000.000	1	9.750.000				0,00	0,00	100	100	100	100		
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai/Endasakan Tuisan dan Cusut	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Bukan)	0	15	100.000.000				5	-	0,00	-	5	46.341.180					0,00	-	0,00	-	5	46.341.180				0,00	0,00	0,00	0,00	100	100		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pasaran Pendidikan Kinerja Perangkat Daerah (%)	0	100	604.487.330				100	134.625.000	100	200.470.000	100	308.653.355					100	130.151.600	100	23.939.400	100	30.140.033				100	96,88	100	14,91	100	93,38		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sepak Koordinasi dan Komitansi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sepak Koordinasi dan Komitansi SKPD (Jumlah)	0	36	589.007.880				12	134.625.000	12	200.470.000	12	231.202.355					12	130.151.600	12	23.939.400	12	29.170.041				100	96,88	100	14,91	100	93,31		
		Sub Kegiatan Jukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Jukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	15.450.000				0,00	-	0,00	-	12	15.450.000					0,00	-	0,00	-	12	12.469.992				0,00	0,00	0,00	0,00	100	80,71		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat daerah (%)	0	80,00	427.544.650				60,00	-	60,00	-	80,00	352.543.650					60,00	-	0,00	-	80,00	322.745.000				100	0,00	0,00	0,00	100	91,55		
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Jasa Operasional dan Jasa	Jumlah Kendaraan Jasa Total 4 (Jah)	0	1	277.050.000				0,00	-	0,00	-	1	277.050.000					0,00	-	0,00	-	1	248.845.000				0,00	0,00	0,00	0,00	100	89,82		
		Sub Kegiatan Pengadaan Perakutan dan Katala Laitan	Jumlah peralihan gedung kantor yang dilakukan (Bukan)	0	3	75.000.000				1	-	0,00	-	0,00	-					0,00	-	0,00	-	0,00	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Rakel Mebel yang dilakukan (Bukan)	0	1	75.493.650				0,00	-	0,00	-	1	75.493.650					0,00	-	0,00	-	1	72.900.000				0,00	0,00	0,00	0,00	100	97,89		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Aspek Perangkat Daerah yang dihidat sesuai Persyaratan (%)	0	100	2.832.963.362				100	833.951.290	100	888.060.770	100	676.535.140					100	813.031.900	100	846.893.602	100	624.338.707				100	97,43	100	97,45	100	92,28		
			Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi (Layanan)	0	5					2		2		2						2		2		2					100		100		100			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Saraf Komunitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Saraf Komunitas (Jumlah)	0	36	2.068.424.475				12	591.280.700	12	646.865.900	12	425.364.770					12	597.610.528	12	634.460.100	12	417.574.962				100	99,72	100	98,46	100	94,17		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan (Laporan)	0	36	4491.327.742				12	138.531.090	12	192.983.700	12	173.524.500					12	131.429.643	12	141.681.722	12	130.568.209				100	94,19	100	92,86	100	75,24		
			Jumlah Layanan aplikasi website yang berbasis (Bukan)	0	36					12	-	12	-	0,00	-					12	-	12	-	0,00	-				100	0,00	100	0,00	0,00	0,00		
			Jumlah Layanan aplikasi Pengadaan Masyarakat yang Terintegrasi (Bukan)	0	36					12	-	12	-	0,00	-					12	-	12	-	0,00	-				100	0,00	100	0,00	0,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Jaminan Kantor yang disediakan (Laporan)	0	36	314.911.745				12	96.138.500	12	72.111.080	12	77.649.870					12	83.811.732	12	70.757.780	12	76.185.536				100	88,28	100	98,12	100	98,11		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	0	100	787.306.800				100	140.886.996	100	162.771.460	100	404.093.190					100	138.327.392	100	162.756.438	100	386.158.048				100	98,13	100	94,43	100	95,37		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baga Pemeliharaan, Pipa dan Perawatan Kendaraan Jasa Operasional dan Jasa	Jumlah kendaraan Jasa Operasional yang dipelihara (unit)	0	33	467.769.200				11	125.436.996	11	141.327.140	11	175.031.190					11	123.048.392	11	135.907.938	11	162.826.618				100	98,10	100	96,17	100	91,06		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Perakutan dan Katala Lainnya	Jumlah perbaikan dan pengelapian kendaraan yang dilakukan (Bukan)	0	3	82.237.600				1	15.490.000	1	20.960.000	1	23.272.000					1	15.279.000	1	16.848.500	1	23.112.800				100	98,89	100	99,42	100	78,96		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Substansi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	0	3	230.900.000				1	-	0	-	1	200.600.000					0,00	-	0,00	-	1	200.162.630				0,00	0,00	0,00	0,00	100	99,78		
		Program Pengelapian Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase regulasi yang diimplementasikan GPT di bidang Komunikasi (%)	0	100	8.573.645.400				100	1.737.103.400	98,55	2.248.065.340	100	1.676.878.710					100	1.681.123.551	96,55	2.080.634.821	100	1.646.382.731				100	96,78	100	92,52	100	93,22	DINKOMINFOK	
		Kegiatan Pengelapian Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	0	30,00	8.573.645.400				67,54	1.737.103.400	67,14	2.248.065.340	98,00	1.676.878.710					67,54	1.681.123.551	67,14	2.080.634.821	98,00	1.646.382.731				100	96,78	100	92,52	100	93,22		
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Isal Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	0	1000	4.525.947.900				900	290.096.900	500	167.970.000	1	216.865.000					900	284.787.438	131,3	144.302.014	1	200.125.000				100	98,17	263	85,51	100	92,28		
		Sub Kegiatan Manajemen Kamunikasi Kela	Jumlah Dokumen Isal Pelaksanaan Manajemen Kamunikasi (Dokumen)	0	2	21.490.000				0,00	-	0,00	-	2	21.490.000					0,00	-	0,00	-	2	18.492.473				0,00	0,00	0,00	0,00	100	86,05		
		Sub Kegiatan Pengelapian Kapasitas Sumber Daya Kamunikasi Publik	Jumlah SAPAS yang Terseleksi (Bukan)	0	3	1.366.165.000				1	366.165.000	1	512.601.240		565.957.610					1	366.040.396	1	508.079.240	0,00	557.200.543				100	99,57	100	99,12	0,00	90,45		
			Jumlah Sumber Daya Kamunikasi Publik yang Menguasai Kompetensi (Dokumen)	0	9					3		3		12						3	-	2	-	12	-				100	0,00	96,67	0,00	100	0,00		



Fakder Pendongon Pencapaian Kinerja: Fakder Penghambatan: Jumlah Tindakan Lanjut pada "Rencana Perangkit Daerah Kabupaten/Kota Berkahya : Jumlah Tindakan Lanjut pada "Rencana Perangkit di Daerah Kabupaten/Kota Berkahya :
--



Secara umum kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten mendekati 100%, masuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja "**SANGAT TINGGI**".

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam pencapaian pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan
2. Akselerasi Program Digitalisasi Pemerintah Pusat.
3. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka peningkatan daya saing daerah
4. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kabupaten Bangka
5. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Bangka
6. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai coordinator penyelenggara persandian dan pengelolaan keamanan informasi Kabupaten Bangka
7. Keterbukaan badan public menjadi indikator keberhasilan
8. Kepuasan Pelayanan Publik menjadi indikator keberhasilan
9. Layanan pemerintahan berbasis elektronik menjadi indikator keberhasilan
10. Tingkat Kematangan Keamanan Informasi menjadi indikator Keberhasilan ketersediaan anggaran

Tabel 3.1

Program Prioritas dan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan PD
1. Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar smart city, peningkatan keterbukaan informasi public (DEDI).	1. Belum semua domain penyusun SPBE memiliki capaian indeks yang optimal 2. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi pemerintah, 3. Belum Optimalnya tingkat kematangan Keamanan



2. Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik, konektivitas komunikasi antar wilayah	Informasi pemerintah 4. Masih Rendahnya kinerja pelayanan informasi publik 5. Belum Optimalnya Pengelolaan Pengaduan masyarakat 6. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral sesuai standar 7. Belum optimalnya penerapan satu data Indonesia 8. Belum optimalnya Pelayanan komunikasi Publik Pemerintah daerah 9. Masih terdapat wilayah/ daerah di Kabupaten Pematang yang blankspot 10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kominfo
---	---

3.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 4 dari 8 aspek SPBE yang capaian nilainya masih rendah
2. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan keamanan informasi pemerintah
3. Belum tersedianya SDM Keamanan Informasi
4. Belum optimalnya pemenuhan 5 area keamanan Informasi pemerintah
5. Masih rendahnya komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/ PPID Pembantu
6. Masih rendahnya kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/ PPID Pembantu;
7. Belum adanya Monev terkait keterbukaan informasi public di lingkungan Pemkab Bangka;
8. Kurangnya respon Perangkat Daerah /BUMD terhadap pengaduan masyarakat;
9. Belum adanya mekanisme *Reward and Punishment*;



10. Kurangnya kapasitas produsen data dalam menyediakan data statistik sektoral;
11. Belum optimalnya sub system pengelolaan satu data Indonesia;
12. Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi pemerintah daerah;
13. Belum optimalnya kemitraan dengan pemangku kepentingan;
14. Belum semua penduduk terlayani jaringan telekomunikasi pita lebar (*mobile broadband*);
15. Belum optimalnya media komunikasi masyarakat;
16. Belum memadainya kapasitas komunikasi masyarakat.



BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Urusan tersebut terbagi menjadi beberapa program yaitu:

- Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika memiliki 2 program yaitu program pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta program pengelolaan aplikasi informatika;
- Urusan Pemerintahan bidang Statistik memiliki program yaitu program penyelenggaraan statistik sektoral;
- Urusan Pemerintahan bidang Persandian memiliki program yaitu program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

Secara keseluruhan pelaksanaan atau pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang telah memenuhi capaian target.

4.2. Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka di masa mendatang antara lain :

1. Audit TIK;
2. Perencanaan Strategis SPBE;
3. Penyusunan dan penerapan tata kelola keamanan informasi;
4. Mitigasi ancaman keamanan informasi;
5. Penguatan Kapasitas PPID dan PPID Pembantu;
6. Pengelolaan data dan pelayanan informasi publik;
7. Peningkatan pengelolaan data Statistik Sektoral.